

URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENGEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA

Budiono

Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: budiono_fkip@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pluralisme bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama dan sebagainya merupakan kekayaan bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain kekayaan tersebut bila tidak dikelola dengan benar dapat sebagai pemicu terjadinya konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Multikulturalisme adalah faham yang memberi pengakuan atas pluralisme budaya yang keberadaannya bukanlah suatu yang *given* tetapi merupakan suatu proses internalisasi dari nilai-nilai di dalam suatu masyarakat. Pemahaman dan penerimaan faham multikulturalisme dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam pluralitas bangsa yang multi etnis dan multi agama ini. Nasionalisme bangsa Indonesia dibangun di atas pluralisme bangsa yang diikat oleh ideologi kebangsaan yang bernama Pancasila. Maraknya sikap primordialisme, fanatisme kedaerahan, politik identitas dan sejenisnya sejak pasca reformasi dapat menggerus nilai-nilai nasionalisme yang mengancam integrasi nasional. Pendidikan multikultural sesuatu yang urgen guna menumbuhkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia, demokratis untuk saling menghormati, jujur, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya bangsa dalam masyarakat majemuk. Melalui pendidikan multikultural diharapkan ada ketangguhan dan fleksibilitas bangsa ini dalam menghadapi berbagai konflik baik vertikal maupun horizontal.

Kata Kunci: Pluralisme; Multikultural; Nasionalisme; Toleransi.

ABSTRACT

The pluralism of the Indonesian people which consists of various ethnic groups, cultures, races, religions and so on constitutes the wealth of the Indonesian nation, but on the other hand such resource if not managed properly can become a trigger for social conflicts that lead to national disintegration. Multiculturalism is a concept that recognizes cultural pluralism whose existence is not a given but a process of internalization of values in a society. Understanding and accepting multiculturalism can be a solution to overcome the various conflicts that occur in this multi-ethnic and multi-religious plurality of nations. Indonesian nationalism is built on national pluralism bound by an ideology of nationhood called Pancasila. The rise of primordialism, regional fanaticism, identity politics and the like since the post-reform era can erode nationalism values that threaten national integration. Multicultural education is something that is urgent in order to foster an attitude of mutual respect, honesty, and tolerance of national cultural diversity in a plural society. Through multicultural education, it is expected that there is resilience and flexibility of this nation in dealing with various conflicts both vertical and horizontal.

Keywords: Pluralism; Multicultural; Nationalism; Tolerance.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengaburkan batas-batas negara bangsa yang telah lama diperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaannya. Kedaulatan dibidang politik, ekonomi, hukum dan budaya seakan tenggelam dalam arus

globalisasi akibat kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi. Menurut Nurhaidah dan Musa (2015) bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Hubungan antar bangsa bukan hanya terbatas pada hubungan antara pemerintah dengan pemerintah negara lain

secara formal, melainkan sudah mencakup hubungan antar komunitas, bahkan antar individu baik secara langsung maupun secara virtual tanpa harus melibatkan peran negara. Dalam konteks kewarganegaraan di era kemajuan teknologi informasi Ribble dan Bailey (dalam Roza. 2020) mengemukakan bahwa saat ini telah terbentuk warga negara digital (*digital citizens*) yang memiliki ciri perilaku tertentu yang berhubungan langsung dengan teknologi. Generasi digital telah memiliki ruang public baru dengan berbagi situs seperti *WhatsApp, Line, Twitter, facebook* dan sejenisnya yang terbuka luas untuk semua individu penggunaanya dapat berhubungan dan bertransaksi tanpa melibatkan peran negara. Kemudahan interaksi global inilah telah menimbulkan kesan bahwa keberadaan negara tidak lagi penting dalam berbagai hal, karena semua individu maupun komunitas dapat mengadakan hubungan antar bangsa dengan mudah sehingga dapat mempengaruhi menurunnya sikap nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan bangsanya. Menurunnya sikap nasionalisme dapat membahayakan eksistensi Negara Bangsa karena basis utama semua aktivitas warga negara bermuara pada kedaulatan negara nasionalnya (Sulistiyono, Singgih Tri:2018)

Menurut Yuniarto (2014) *global governance*, integrasi ekonomi, regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, *common market*, transnasional migrasi, *political union*, human security, dan lain-lain merupakan sebagian istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Persoalan globalisasi dan segala kaitannya di berbagai area tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalan dan kajiannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau berbagai alternatif bentuk pengelolaan dan penyelesaian persoalan di seputar isu tersebut.

Struktur masyarakat Indonesia yang pluralis perlu adanya pemahaman tentang

multikulturalisme untuk memperkokoh integrasi nasional yang selama ini masih diwarnai kuatnya sikap primordialisme yang mempertahankan "egoisme" kebudayaan dan kedaerahan. Selain penguatan pemahaman multikulturalisme salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi pluralitas masyarakat Indonesia yang rawan konflik menurut Irianto (2013) yaitu dengan cara menguatkan konsep integrasi nasional.

Multikulturalisme dapat dikatakan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya dan bukanlah suatu yang "given" tetapi merupakan suatu proses yang diupayakan agar terjadi internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas menuju masyarakat yang harmonis (Hanum. 2012). Multikultural dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama, dengan menjaga pluralitas akan tercapai kehidupan masyarakat yang ramah dan damai.

Bagi negara yang struktur masyarakatnya relatif homogen atau terdiri dari satu suku bangsa yang dominan, upaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis tidak banyak menghadapi kendala. Lain halnya bagi bangsa Indonesia yang struktur masyarakatnya majemuk (*Plural Societies*) tentu banyak menghadapi kendala dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmoni. Meningkatnya suhu politik identitas suku bangsa atau yang berbasis agama seringkali memicu terjadinya konflik antar kelompok masyarakat (Umikalsum, 2019). Oleh karena itu multikulturalisme dalam masyarakat yang majemuk memiliki peran penting untuk mengantisipasi resiko konflik sosial yang mungkin terjadi. Struktur Sosial pada masyarakat majemuk semacam ini perlu dibangun integrasi sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam hal ini integrasi sosial dimaksudkan sebagai proses penyesuaian untuk saling memahami, menerima keadaan, pandangan, dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis. Integrasi sosial tersebut akan

terwujud apabila masing-masing individu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat dapat mengendalikan prasangka yang ada ditengah masyarakat sehingga tidak terjadi konflik.

Penyatuan kelompok manusia yang terdiri dari beragam suku, etnis dan beda keyakinan ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai ‘bangsa’ bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, tetapi melalui upaya dan perjuangan. Oleh karena itu gagasan besar yang dirintis oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 tidak boleh terlupakan oleh generasi selanjutnya, karena dari beliau lah ide negara nasional yang dicita-citakan menjadi kenyataan yang sekarang bernama Indonesia. Berkat perjuangan beliau yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 28 Oktober 1928 masyarakat yang majemuk tersebut dapat mengerucut, bersatu dan berikrar untuk menyatakan mengaku bahwa bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berkembangnya nasionalisme Indonesia tersebut digerakkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat majemuk yang menyatukan dan mengikatkan diri menjadi satu bangsa dan dalam ikatan satu negara-bangsa (*nation state*) yang bernama Indonesia. Berkembangnya nasionalisme Indonesia yang lahir sejak Kebangkitan Nasional tersebut sangat bergantung pada kohesivitas dalam bentuk ketahanan budaya yang bertumpu pada ikatan budaya bangsa (Sulistiyono: 2018) Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka lebar era globalisasi terjadi kilas balik yang terjadi memudarnya rasa nasionalisme khususnya dikalangan generasi muda yang ditandai dengan maraknya fenomena sosial yang tidak mencerminkan rasa bangga terhadap tanah air dan bangsanya.

Indonesia sebagai suatu negara yang pluralistik dan multikultur mengharuskan masyarakatnya untuk bisa hidup bersama

dalam sebuah perbedaan, karena perbedaan suku, etnis, dan agama adalah suatu keniscayaan yang harus diterima keberadaannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fatih (2019) bahwa di dalam lapisan masyarakat yang cenderung bersifat inklusif, pluralisme dimaknai sebagai sesuatu yang normatif. Dalam hal ini, pluralisme hanya terimplementasi melalui sikap toleransi semata yang didasarkan pada norma dan nilai humanis. Nilai-nilai luhur yang berkembang dalam pluralitas itu mengkristal menjadi sebuah pandangan hidup bangsa digali oleh pendiri negeri ini menjadi sebuah ideologi yang bisa diterima oleh semua unsur bangsa dan diberi nama Pancasila. Keberadaan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai otoritas yang kuat dalam menjaga tertibnya tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum positif ideologi ditetapkan sebagai Dasar Negara yang bersifat imperative yakni mengikat dan memaksa kepada seluruh unsur bangsa untuk mentaatinya. Oleh karena itu pluralisme dan multikulturalisme harus tetap menjadi fokus perhatian dalam struktur masyarakat majemuk agar keharmonisan kehidupan masyarakat dapat terjaga dan dapat mengantarkan tercapainya tujuan bersama (Masduki: 2016).

Dengan demikian kecanggihan teknologi informasi dewasa ini yang telah dapat menyatukan komunikasi antar bangsa, antar kelompok, bahkan antar individu diseluruh belahan dunia tanpa batas sudah seharusnya tetap dapat menjaga etika komunikasi di ruang publik baru yang disebut dunia maya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhadis (2013) bahwa suatu bangsa yang menguasai pemanfaatan dan pengembangan teknologi berpotensi “menguasai dunia”. Lahirnya pola komunikasi baru pada warga negara digital jangan sampai merusak harmoni tatanan masyarakat majemuk dan pluralisme bangsa yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang dimanfaatkan untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell (2008). Jenis dan sumber data *pertama*, dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian yang mengkaji tentang pendidikan multikultural dan masalah nasionalisme. Sumber data *kedua*, berupa data dokumen analisis dan bahan cetakan yang meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah multicultural dan pengembangan nasionalisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yakni melalui studi dokumentasi, dan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa referensi yang bertemakan multikulturalisme dan nasionalisme. Analisis data digali dari sumber yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan khusus, sampai menemukan sebuah analisis atau temuan tentang urgensi multikulturalisme dalam pengembangan nasionalisme bangsa Indonesia. Sedangkan proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil analisis data, verifikasi data dan hasil pengamatan hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki struktur masyarakat yang pluralistik dan multikulturalistik. Sebagai bangsa yang besar upaya untuk mempertahankan integritas nasionalnya bukanlah hal yang mudah, karena itu eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu mempersatukan bangsa dan menjaga stabilitas kehidupan bangsa harus dimasyarakatkan kepada seluruh elemen bangsa agar jiwa dan semangat nasionalisme tidak pudar

ditengah derasnya arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Pluralisme

Indonesia adalah bangsa yang struktur masyarakatnya plural (beragam) baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, terlihat dari adanya perbedaan ras, suku bangsa, budaya, dan agama. Secara vertikal, adanya perbedaan strata sosial berdasarkan faktor ekonomi dan politik. Pluralitas tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan, baik keragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Realitas keragaman bangsa Indonesia tersebut dikatakan Nurcholis Madjid sebagai Pluralisme yang memandang suatu sistem nilai secara positif optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut (Halwati. 2018). Pluralisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau kebijakan menerima keragaman sistem kepercayaan, suku, etnis, budaya yang ada dalam masyarakat. Pluralisme juga dimaknai sebagai suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Masduki: 2016).

Negara yang memiliki Struktur masyarakat majemuk jika tidak dikelola dengan baik rentan menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial sering terjadi sebagai akibat dari sikap keragaman budaya, kesukuan, agama dan lain-lain. Sikap yang dapat menstimulus terjadinya konflik sosial antara lain eksklusifisme (mengisolasi diri dari kelompok lain), fundamentalisme (tidak mau menerima perubahan), radikalisme (mencapai tujuan dengan cara kekerasan), primordialisme (ikatan kesukuan yang berlebihan), ras

dan agama (Wahid. 2018). Oleh karena itu, membangun Indonesia dengan wawasan keberagaman dalam bingkai nasionalisme sangat urgen dan harus terus menerus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi objektif negara Indonesia adalah negara kepulauan yang melahirkan kemajemukan secara sosial budaya suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi. Kemajemukan harus dipahami sebagai anugerah dan keniscayaan. Sedangkan pluralitas sesungguhnya bertujuan untuk saling melengkapi antara sesama manusia dan alam semesta, pluralitas juga termasuk dalam soal keyakinan (Halwati. 2018)

Multikulturalisme

Multikulturalisme merupakan faham yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok suku, etnik, agama atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati kelompok lain. Pendidikan multikultural penting untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, karena dengan pendidikan multikultural dapat memperkokoh integrasi nasional. (Tukiran. 2014) Sebagaimana dipaparkan Bikhu Parekh Multikulturalisme adalah cara pandang kebudayaan yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupan yang nyata. Terminologi multikulturalisme mengandung dua pengertian, pertama; multikulturalisme merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang majemuk dan kedua; multikulturalisme berarti faham atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang harus diakui dan dihormati keberadaannya. Sejalan dengan terminologi tersebut menurut Supardan bahwa kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata kunci ini sering dikonfrontasikan (Erawati: 2017).

Multikultural bukan sekedar hanya pangakuan terhadap keanekaragaman budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan pola-pola

perilaku anggota masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, karena itu, multikultural juga berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi didalamnya tidak mengakui adanya multikulturalisme dalam kehidupan bangsanya, fenomena semacam ini sering menjadi penyebab terjadinya berbagai jenis konflik vertikal maupun konflik horizontal.

Multikulturalisme juga sebagai landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat mendasar bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pada umumnya mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya multikulturalisme untuk membangun toleransi, asimilasi, dan persamaan hak di antara warga negara. Hal tersebut merupakan faktor-faktor kunci dalam konsolidasi dan landasan demokrasi sehingga negara-bangsa mampu bertahan dan berkelanjutan. Dalam membangun demokrasi ada satu hal yang penting dalam multicultural yakni pengakuan atas kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi dalam upaya-upaya penguatan *nation-building* (Erawati: 2017).

Nasionalisme

Nasionalisme atau faham kebangsaan lahir sebagai reaksi dari akibat penjajahan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke 15 hingga abad ke 20. Menurut Notonagoro (1975) hakikat kebangsaan Indonesia adalah satu kodrat manusiawi, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang berbeda dengan paham liberal yang individualistis dan juga paham sosialisme komunis yang semata-mata menekankan kepada prinsip kolektivisme. Ernest Renan, wawasan kebangsaan terbangun dari keinginan satu kelompok manusia untuk bersatu, sedangkan Otto Bauer menambahkan, mereka bersatu

karena persamaan karakter. Lebih luas Soekarno merangkum nasionalisme yaitu dengan dasar keinginan dan karakter yang sama, kelompok manusia tersebut bermukim dalam satu unit geopolitik, untuk lahir sebagai satu bangsa (Bung Karno dalam Hendropriyono: 2008) Nasionalisme Indonesia merepresentasikan sebuah ikatan budaya yang menyatukan dan mengikat rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa yang bersatu dan berdaulat. Upaya untuk menyatukan pada sebuah ikatan bangsa itu, maka diperlukan ikatan budaya sebagai pandangan hidup bangsa.

Nasionalisme adalah kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud: 1997), Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur, artinya persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak

dari ikatan nasionalisme. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan diri, mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri (Widiyono. S: 2019).

Nasionalisme Indonesia sebagai ideologi, dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional (Tukiran. 2014) Saat ini, liberalisasi politik melalui demokratisasi di Indonesia sekaligus mendatangkan sejumlah tantangan baru, termasuk dalam relasi Islam dengan nasionalisme. Di kalangan umat Islam Indonesia bangkit kembali gagasan tentang pembentukannegara Islam(daulah Islamiyyah) atau setidaknya perubahan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan mengembalikan 'Piagam Jakarta' yang memungkinkan pemberlakuan syari'at Islam oleh negara (Halwati. 2018: 332) Menurut "A.D. Smith" Nasionalisme diartikan sebagai gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja (Masduki: 2016). Berkembangnya nasionalisme Indonesia sangat bergantung pada kohesivitas dalam bentuk ketahanan budaya yang bertumpu pada ikatan budaya tersebut. Ikatan ini mampu menjadi daya tahan yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi yang cenderung berdampak pada peniadaan batas-batas teritorial dan kedaulatan bangsa (Sulistiyono: 2018).

SIMPULAN

Pentingnya semangat nasionalisme, eksistensi negara-bangsa, dan integrasi nasional dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan beberapa negara dunia ketiga yang merupakan bekas

negara-negara jajahan. Banyak negara telah dilanda perang saudara yang menyebabkan disintegrasi negara dan bangsa karena mereka tidak mampu lagi memupuk dan mempertahankan integrasi nasional mereka, seperti Yugoslavia, Pakistan, Libanon, bahkan negara adidaya seperti Uni-Soviet juga mengalami kehancuran. Negara Dunia Ketiga seperti Indonesia yang batas-batas wilayah negara disesuaikan dengan batas-batas wilayah yang dipaksakan begitu saja oleh negara kolonial yang mewariskannya tanpa kompromi terlebih dahulu dengan penduduk setempat, pemupukan integrasi nasional menjadi amat penting. Selain itu, pemerintah nasional yang baru merdeka itu tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengatur daerah-daerah yang dikuasainya sesuai dengan kehendak kelompok-kelompok etnik yang berbeda-beda. Dalam konteks itulah maka integrasi nasional dirasakan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Apalagi jika negara-bangsa yang baru merdeka itu merupakan negara yang luas dan memiliki keanekaragaman potensi wilayah, ras, etnik, dan latar belakang budaya, maka integrasi nasional merupakan sesuatu yang sangat mendasar.

Dengan demikian pluralisme bangsa Indonesia yang sudah bersifat alamiah (*given*) harus dapat dipahami bersama dan multikulturalisme sebagai pandangan untuk menerima kesepakatan yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi konflik sosial melalui kerjasama merupakan syarat utama untuk menjaga integrasi bangsa. Maraknya paham baru yang berseberangan dengan pandangan multikulturalisme dan melemahkan integrasi nasional harus ditanggulangi agar tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John.W. (2008). *Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitatif & Qualitatif Research*. Third Edition, New Jersey: Pearso Education.
- Erawati, Desi. (2017). Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13 (1)
- Fatih, Moh. Khoirul. (2019). Membumikan Pluralisme di Indonesia: Manajemen Konflik Dalam Masyarakat Multikultural. *MADINAH: Jurnal Studi Islam*, 6 (1), 29-38.
- Halwati Umi, Johar Arifin dan Imam Alfi. (2018). Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, (12) 2
- Hanum, Farida. (2012). *Pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa*. Yogyakarta: Lumbung Pustaka.
- Hendrastomo, Grendi. (2007). Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan Dalam Peradaban Modern. *DIMENSIA*, 1 (1).
- Hendropriyono, A.M. (2008). Ide dan Praksis Neo-Nasionalisme Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Filsafat*, 18 (1)
- Irianto, Agus Maladi. (2013). Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia. *Humanika*, 18 (2), 1-6.
- Kymlicka, Will. (2011). *Kewarganegaran Multikultural*. Jakarta: LP3ES
- Lay, Cornelis. (2006). Nasionalisme dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (10) 2.
- Mahfud, Choirul. (2013). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masduki, Hendri (2016). Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (Telaah dan urgensinya dalam sistem berbangsa dan bernegara). *Jurnal Dimensi*, 9 (1), 15-24.
- Mukhadis, Amat. (2013). Sosok Manusia Unggul dan Berkarakter Dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3 (2), 115-136.
- Nurhaidah & Musa, M. Insyah. (2015).

- Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3 (3), 1-14.
- Parekh, Bhikhu. (2008). *Rethinking Multikulturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta. Kanisius.
- Rosyada, Dede. (2014). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Sosio Didaktika*, 1 (1).
- Roza, Prima. (2020). Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis di Abad Digital. *Jurnal Sosio Teknologi*. 19 (2).
- Sulistiyono, Singgih Tri. Nasionalisme, Negara-bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: masih perlukah?. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3 (1).
- Syaifuddin, Achmad Fedyani. (2006). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*, 2 (1).
- Tukiran. (2014). Pendidikan Multikultural dan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1).
- Umikalsum, Afif dan Fauzan. (2019). Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat. *JAWI*, 2 (1), 65-86.
- Wahid, Abduh. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya masa kini). *Jurnal Sulesana*, 12 (1).
- Wibowo, Arif Prasetyo dan Margi Wahono. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*, 14 (2).
- Widiyono. S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Populika*, 7 (1).
- Yuniarto, Paulus Rudolf. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5 (1), 67-95.